

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (Studi Kasus Sistem Informasi Potensi Investasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang)

Nana Mulyana <sup>a</sup> Dr.Drs.Joko S. Dwi Raharjo,S.Kom,M.Kom <sup>b</sup>  
Dr.Agus Lukman Hakim, SE,M.Si <sup>c</sup>

<sup>abc</sup> Program Pascasarjana, Magister Ilmu Administrasi Bisnis  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

e-mail : <sup>a</sup> [nana300183@gmail.com](mailto:nana300183@gmail.com), <sup>b</sup> [joko.sdr1707@gmail.com](mailto:joko.sdr1707@gmail.com), <sup>c</sup> [aguslukman.hakim@stiabanten.ac.id](mailto:aguslukman.hakim@stiabanten.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian mengenai Efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Studi Kasus Sistem Informasi Investasi di Kabupaten Pandeglang ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Sistem Informasi Investasi (SIGAMPANG) di Kabupaten Pandeglang. Sistem Informasi Investasi (SIGAMPANG) merupakan instrumen penting dalam rangka peningkatan minat investasi dari para investor yang bermuara pada meningkatnya nilai investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pandeglang. Selama ini penerapan SIGAMPANG belum berjalan optimal salah satunya disebabkan oleh belum efektifnya penerapan prinsip tata kelola dan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui efektivitas SPBE Sistem Informasi Investasi (SIGAMPANG) di Kabupaten Pandeglang dari sisi tata kelola SPBE sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional khususnya mengenai Peran Tim Koordinasi SPBE, Perencanaan SPBE, Penganggaran SPBE serta Pemantau dan Evaluasi SPBE. Saat ini terdapat banyak penelitian terkait SPBE namun fokus pada peningkatan indeks SPBE itu sendiri, bukan pada dampak yang bisa dilahirkan pada penggunaan sistem informasi seperti SIGAMPANG. Penelitian ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi bahan pertimbangan pengambil kebijakan di Kabupaten Pandeglang agar Sistem Informasi Investasi (SIGAMPANG) yang merupakan program unggulan Bupati Pandeglang bisa berjalan optimal dan efektif.

**Kata Kunci :** Efektifitas, Tata Kelola SPBE, Sistem Informasi Investasi

### Abstract

*Research on the Effectiveness of the Electronic-Based Government System (SPBE) Case Study of the Investment Information System in Pandeglang Regency aims to determine the extent of the effectiveness of the implementation of the Investment Information System (SIGAMPANG) in Pandeglang Regency.*

*The Investment Information System (SIGAMPANG) is an important instrument in increasing investment interest from investors which leads to increasing investment value and Regional Original Income (PAD) in Pandeglang Regency. So far, the implementation of SIGAMPANG has not run optimally, one of which is due to the ineffective implementation of governance principles and Electronic Based Government System (SPBE) policies in Pandeglang Regency. This research uses descriptive analysis with qualitative research methods to determine the effectiveness of the SPBE Investment Information System (SIGAMPANG) in Pandeglang Regency in terms of SPBE governance in accordance with Presidential Regulation Number 132 of 2022 concerning National SPBE Architecture, especially regarding the Role of the SPBE Coordination Team, SPBE Planning, SPBE Budgeting, and SPBE Monitoring and Evaluation. Currently there is a lot of research related to SPBE but it focuses on increasing the SPBE index itself, not on the impact that can be had by using information systems such as SIGAMPANG. This research is very important because it can be used as material for consideration by policy makers in Pandeglang Regency so that the Investment Information System (SIGAMPANG), which is the Pandeglang Regent's flagship program, can run optimally and effectively.*

**Keywords:** Effectiveness, SPBE Governance, Investment Information System

### A. PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di tingkat pusat maupun daerah menyelenggarakan reformasi birokrasi berdampak. Istilah reformasi birokrasi berdampak dicetuskan oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas sebagai upaya pemerintah agar ASN tidak lagi bekerja dengan orientasi administratif, tenggelam dalam tumpukan kerja, serta menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengurus

# SEMNASIA

## (Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0  
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

surat pertanggung jawaban (SPJ). Pemerintah saat ini berharap setiap hasil kinerja ASN mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Reformasi birokrasi berdampak yang dicetuskan oleh Menpan-RB Abdullah Azwar Anas disusun secara tematik berdasarkan program prioritas pemerintah. Pada tahun 2023 reformasi birokrasi berdampak diarahkan pada empat (4) sasaran utama yaitu kemiskinan, investasi, percepatan program prioritas (penggunaan produk dalam negeri, inflasi dan stunting), serta digitalisasi pemerintah sebagai penopang dari tiga sasaran pemerintah di atas. (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-minta-birokrasi-harus-berdampak-turunkan-stunting>, di akses pada tanggal 1 September 2023).

Digitalisasi pemerintah yang kini lebih dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki peran penting dalam penerapan reformasi birokrasi berdampak di Indonesia. Sepriano et al. (2023) menyatakan digitalisasi diarahkan untuk merevolusi desain pelayanan publik lama dengan sistem manual agar beralih ke sistem baru yang digital agar pelayanan menjadi lebih cepat, tepat dan mudah. Dengan kata lain, digitalisasi sangat diperlukan oleh setiap lini organisasi sektor pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

SPBE memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan informasi dan akses layanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPBE dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu mampu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan akuntabel. Mengingat pentingnya peran digitalisasi dalam reformasi birokrasi berdampak maka digitalisasi tersebut, menjadi bagian dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 sesuai dengan Pedoman Pemantauan Evaluasi SPBE Nomor 6 Tahun 2023.

memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan informasi dan akses layanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPBE dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu mampu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan akuntabel. Dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengatur domain yang indeksnya harus dimaksimalkan oleh Instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Domain

tersebut adalah Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE (Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdampak pada kualitas e-Government di Indonesia. data United Nations E-Government Survey 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 77 dunia dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Posisi tersebut meningkat dibanding tahun 2020 yang berada di urutan ke-88 dan berada di peringkat 107 pada tahun 2018. (*Indonesia Naik 11 Peringkat Hasil Survey E Government PBB*, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-naik-11-peringkat-hasil-survei-e-government-pbb>, diakses 4 September 2023).

### B. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti membahas "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Studi Kasus Sistem Informasi Investasi)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang terjadi (1) terjadinya perpindahan kewenangan pengelolaan SIGAMPANG sejak awal pembangunan pada tahun 2020 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ke DPMPSTP. Kemudian setelah berjalan satu tahun kewenangan pengelolaan SIGAMPANG kembali berpindah dan menjadi tanggung jawab Diskomsantik Pandeglang. Perpindahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan perencanaan dan penganggaran dari masing-masing perangkat daerah yang terlibat (Bappeda, DPMPSTP dan Diskomsantik) Kabupaten Pandeglang. (2) Permasalahan lainnya yang menyebabkan SIGAMPANG belum berjalan efektif dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pandeglang adalah belum adanya gambaran yang jelas tentang kerangka dasar pengembangan aplikasi (Arsitektur) serta proses bisnis yang mengatur peran dan fungsi berbagai perangkat daerah yang terlibat dalam pengembangan SIGAMPANG. Padahal SIGAMPANG merupakan aplikasi prioritas dan menjadi unggulan Kepala Daerah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Pandeglang. Permasalahan berikutnya yang juga cukup krusial adalah peran ketua tim koordinasi dalam hal ini Sekretaris Daerah dalam memimpin dan mengarahkan agar SIGAMPANG dapat benar-benar berperan dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pandeglang. Melihat dari permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian menggunakan teori Sondang P Siagian (2008) yaitu terkait dengan strategi pencapaian tujuan, perencanaan dan penganggaran yang matang, pelaksanaan yang efektif dan efisien, ketersediaan sarana

# SEMNASIA

## (Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0  
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

dan prasarana yang memadai serta pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Mengacu pada peraturan presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang dilakukan peneliti di Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peneliti menggunakan teori Sondang P Siagian (2008) yaitu sebagai berikut :

1. Kurun waktu yang ditentukan.
  2. Tidak lagi idelaistik melainkan pemikiran pragmatis dalam arti bahwa sasaran tersebut diyakini memang mungkin tercapai.
  3. Sasaran merupakan target yang konkret.
- Guna memperjelas terkait kendala dan hambatan yang dialami dalam efektifitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik studi kasus sisten inofrmasi potensi investasi pada pemerintah Kabupaten Pandeglang maka peneliti menyusun kedalam bentuk tabel dibawah ini :

1. Dari sisi kebijakan / regulasi.
  - a) Belum adanya peraturan daerah yang mengikat tetang investasi daerah.
  - b) Belum adanya audit internal dari pihak inspektorat terkait investasi daerah.
  - c) Belum adanya surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan TIM Pendukung penyusunan tahun 2023.
  - d) Belum dirubahnya Surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang TIM Penyusun terkait Investasi Daerah.
2. Dari sisi sistem aplikasi.
  - a) Belum adanya perubahan data dari beberapa OPD terkait investasi.
  - b) Belum adanya pembangunan aplikasi seperti pembangunan mobile dan web potensi pandeglang berbasisi GIS dengan sistem berada di Cloud
  - c) Belum adanya pengembanga aplikasi seperti pengembangan mobile dan web potensi pandeglang berbaisi GIS.
  - d) Belum adanya pembangunan sosial media seperti tersedianya akun sosial media sebagai media promosi.
  - e) Belum adanya pembangunan BOT WA sigampang seperti tersedianya WA centang hijau (Verified) resmi di aplikasi untuk memudahkan

investor berkomunikasi tanpa aplikasi selai whatsapp dan dillayani oleh robot yang telah di desain melayani investor yang berbasis artificial intelligence.

3. Dari sisi investasi.
  - a) Nilai investasi tiap tahun masih fulktuasi dan tidak stabil.

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini kedalam beberapa point dibawah ini :

1. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah banyak mengeluarkan berbagai program untuk meningkatkan PAD yang tentu saja memiliki tujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan salah satunya yaitu melalui sistem digital, akhirnya pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Pandeglang meluncurkan sebuah aplikasi sistem informasi potensi Investasi atau sering disebut dengan aplikasi SIGAMPANG. Kemunculan aplikasi ini sangat diharapkan dapat membawa perubahan serta memiliki manfaat yang besar dalam meningkatkan nilai investasi yang dengan harapannya dapat juga meningkat PAD Kabupaten Pandeglang.
2. Adanya aplikasi SIGAMPANG sebagai solusi untuk meningkatkan nilai investasi nyatanya belum dapat dimanfaatkan secara optimal, aplikasi SIGAMPANG sampai pada saat ini belum mampu membawa perubahan kenaikan nilai investasi secara signifikan. Nilai investasi setiap tahunnya masih tetap mengalami fluktuasi dan tidak stabil. Jumlah investor yang tidak menentu serta nilai investasi dari berbagai sektor yang tidak tentu hasilnya.
3. Implementasi aplikasi sistem informasi potensi investasi atau SIGAMPANG berdasarkan teori efektifitas dari pengelolaan sistem informasi SPBE menurut Sondang P Siagian (2018:77) dengan beberapa indikator seperti : Kejelasan tujuan dan strategi yang hendak dicapai; Proses regulasi dan kewenangan program; Perencanaan yang matang; Tersedianya sarana dan prasarana; Pelaksanaan yang efektif dan efisien ; Sistem pengawasan dan pengendalian . Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara menunjukan bahwa dari ke 6 indikator tersebut ditemukan tidak efektif. Mulai dari kurangnya memiliki tujuan dan strategi yang jelas,

# SEMNASIA

## (Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0  
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

tidak adanya regulasi terkait penanaman modal dan investasi di Kabupaten Pandeglang, sarana dan prasarana yang tidak didukung dengan aplikasi lain yang dapat mendukung SIGAMPANG efektif, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan dan ketua tim yang kurang optimal.

4. Dalam pengelolaan aplikasi SIGAMPANG ditemukan berbagai kendala dan hambatan diantaranya dari sisi regulasi tidak adanya regulasi. Adapun upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan aplikasi SIGAMPANG yaitu : Promosi dengan mengikuti pameran, pemanfaatan sumber daya alam dan potensi daerah, mengadakan pertemuan rutin dengan para investor untuk menambah atau menaikkan nilai investasi. namun upaya-upaya tersebut belum memberikan solusi serta belum mengatasi permasalahan secara menyeluruh.

### Saran :

#### 1. Untuk Bupati Pandeglang

- Segera rumuskan dan tetapkan regulasi peraturan daerah terkait penanaman modal atau investasi agar memudahkan dalam pengelolaan investasi di Kabupaten Pandeglang
- Lakukan evaluasi dan monitoring secara menyeluruh terkait kinerja para OPD yang diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan SIGAMPANG, sehingga aplikasi digital ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan PAD di Kabupaten Pandeglang.
- Segera cari tahu terkait permasalahan SIGAMPANG dan berikan solusi yang dapat mengatasi permasalahan implementasi aplikasi SIGAMPANG yang tidak efektif

#### 2. Untuk Setda Kabupaten Pandeglang

- Tingkatkan kembali kinerja sebagai ketua tim SPBE.
- Tingkatkan kembali sosialisasi dan koordinasi dengan para SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan SIGAMPANG
- Lakukan pengawasan dan pengendalian kembali terhadap kinerja sehingga hasil akan maksimal dan sesuai tujuan bersama.

#### 3. Untuk Diskomsantik Kabupaten Pandeglang

- Tingkatkan kembali promosi dari berbagai media, bukan hanya menggunakan media digital melainkan semua media dan alat yang dapat digunakan untuk promosi dan sosialisasi perlu untuk digunakan.
- Ikuti pelatihan khusus terkait sistem informasi sehingga dalam penggunaannya aplikasi SIGAMPANG dapat optimal dan berkembang.

Sehingga SDM akan unggul dan berkualitas.

#### 4. Untuk DPMTSP Kabupaten Pandeglang

- Tetap bersinergi dengan SKPD lainnya untuk kolaborasi mengembangkan dan membantu agar nilai investasi dapat naik secara signifikan.
- Lakukan promosi secara terus menerus dengan di bantu Diskomsantik, agar aplikasi SIGAMPANG dapat diketahui banyak orang. Khususnya bagi para calon investor baru.

### REFERENSI

#### Buku:

- Anggito Albi dan Setiawan Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher
- Anonim. (2022). *Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022*. Jakarta: Kemenpan RB.
- Anang firmansyah, Fatihudin Didin (2019). *Pemasaran Jasa: (Strategi, Mengukur Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan)*, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Anton, sukarno (2020). *Ciri-ciri kemandirian*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Cresswell J.W (2019). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Singapore: Sage Publications terjemahan "Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Denzin K. N. Lincoln S.Y. (1994) *Hand Book of Qualitative Research*. London - New Delhi: Sage Publications
- Dwi Astono, A. (2021). *Metodologi Penelitian: Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Semarang: Cahya Ghani Recovery
- Handoko, T. Hani (2015). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu, SP (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- , (2015). *Manajemen organisasi dan motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kirk Jerome, Miller Marc. L. (1986). *Qualitative Research Methods Series 1*. New Delhi: Sage Publications
- Moleong, lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Mahmudi. (2014). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

# SEMNASIA

## (Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0  
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

- (2015). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Notoatmojo S. (2018). *Metodologi Penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pabundu, Tika. (2018). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sadono, Sukirno. (2018). *Makro ekonomi teori pengantar*. Jakarta : PT. Rajawali Pers.
- Certo, Samuel C. & S. Travis Certo. 2017. *Modern Management*. Pearson: Prentice-Hall International, Inc.
- Drucker, P. F. (2012). *Inovasi dan Kewiraswastaan*. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, Ulber. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Simamora, H. (2015). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: SIE YKPN
- Siagian (2020), *Manajemen Sumber Daya*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju
- Sunariyah. (2013) *Pengantar pengetahuan pasar modal edisi ke empat*. Yogyakarta : UPP Amp Ykpn.
- Sutopo. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press  
Rosdakarya Offset .
- Sondang P Siagian (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sofaer, S. (2019) "qualitative methods what are they and why use them? Health ser vices research (34). 1101-1118 edisi terjemahan".
- Soewarno, Handayani, 2019. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan. Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Yvonna S. Lincoln Egon G. Guba (1985). *Naturalistic Inquiry*. New Delhi: Sage Publication
- William N. Dunn. (2020) " *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*" edisi kedua. Yogyakarta : Gajah Mada University press.
- Jurnal/artikel/tesis/skripsi :**  
Agus Purnomo Adi Putra dan Ni Gusti Putu Wirawati. 2015. *Penilaian Kinerja Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 11(1), 252-268.
- Amalia, P. R. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Konsep Value For Money Di Pemerintah Kota Ternate* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Manado)
- Ali Rokhman dkk, (2023). *The Effect of E-Government, E Billing, and E Filing on Tax payer Compliance: A Case of Tax Payers*. International Journal of Data and Network Science, 7, 49-56.
- Ami Afriyani. (2022). *Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE Mandiri) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang*. JMO. 13 (2). 148-165.
- Jinghua Yin, Haiying Song. (2023). *Does Perception of Smart Governance Enhance Commercial Investment? Evidence from Beijing, Shanghai, Guangzhou dan Hangzhou*. Heliyon 9 (299). 1-17.
- Lin, Aijie Peng, Yulei Wu, Xi (2022) *Digital Finance and Investment of Micro and Small Enterprises: Evidence from China*. China Economic Review Vol 75.
- Linda Lestari, Zulkarnaini. (2023) *Pelaksanaan E Government Melalui Online Single Submission di DPMPSTP Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 9 (8). 276-286.
- Nwankpa J.K, Merhout J.W. (2020). *Exploring the Effect of Digital Investment on IT Innovation*. Sustainability, 12 (7374), 1-26.
- Nunuy Nur Afiah dkk. (2021). *Investasi Daerah dan E Government Serta Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah*. Bina Ekonomi 25 (2) 115-131
- Rindri Andewi Gati. (2022). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di DPMPSTP Kota Bandung*. Journal of Business Administration & Entrepreneurship. 4 (1). 37-46.
- Suzani, Lyeis Nadia. (2022). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Online Single Submission (OSS) Dalam Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis*. Unigal Repository. 2 (1). 1243-1253.
- Makalah:**  
Ali J Al Shadiq. (2021). *The Role of E-Government in Promoting Foreign Direct Investment Inflows*. IMF Working Paper.
- La Porte Robert jr (2022) *Governance A Global Perspective Makalah dipresentasikan pada The South Asia Regional Conference of the Hubert H. Humphrey Fellowship Program, Kathmandu Nepal*.
- Lembaran Negara**  
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 *Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakarta:  
Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 *Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial* .  
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 *Tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*  
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 tahun 2022 *Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*